

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN FISIK
DI KEPENGHULUAN BANGKO PUSAKA KECAMATAN BANGKO PUSAKO
KABUPATEN ROKAN HILIR**

Bayu Sapta Jaya LBS

Pembimbing: mayarni, S.Sos, M.Si

Ilmu Administrasi Negara

saptajaya18@yahoo.com FISIP Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5
Simpang Baru Panam, Pekanbaru, 28293

Abstract

Abstract: Community Participation in Physical Development in Kepenghuluan Bangko Pusaka Bangko Pusako Heritage District of Rokan Hilir. Adviser : Mayarni. Community participation in development is the participation of the community in the development process either in the planning stages of development through musrenbangkep, the implementation phase of development, to evaluate the development and benefit the development. Community participation in development planning through development planning meetings (musrenbang) is still minimal and passive, this was due to lack of public understanding of the development planning, low levels of education, and lack of socialization of the then government did not include the community in development planning.

The concept of the theory used is participation. Researchers used Soetomo theory. This study aims to determine how the public's participation in physical development in Kepenghuluan Bangko Pusaka Bangko Pusako Heritage District of Rokan Hilir. This study uses qualitative research methods with an assessment of descriptive data. In collecting the data the researcher used interview, observation and documentation. By using key informants as a source of information.

The results showed that participation in physical development is still very minimal and passive, meaning that there are still many people who are not involved in any stage of development to be carried out and they handed over all decisions to the other party. In this case the researchers advise people to participate actively in every stage of development and the government should also seek more public participation and active for the idea / ideas that come from the community more so that it can be considered as well as the evaluation for the next year.

Keywords: Participation, Community, Development

Pendahuluan

Pembangunan merupakan proses perwujudan cita-cita Negara untuk mewujudkan masyarakat yang makmur sejahtera secara merata diseluruh wilayah Indonesia, pembangunan sebagai upaya meningkatkan derajat kehidupan secara berkelanjutan untuk

mampu menentukan nasib ditangannya sendiri, yaitu mencerdaskan manusia dan melepaskan mereka dari ketergantungan pada manusia lain. Pembangunan prasarana dan sarana dilakukan untuk menunjang kegiatan manusia dalam pembangunan.

Dalam merealisasikan tujuan pembangunan, maka segenap potensi alam harus digali, dikembangkan, dan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Begitu pula dengan Potensi manusia berupa penduduk yang banyak jumlahnya harus ditingkatkan pengetahuan dan keterampilannya sehingga, mampu menggali, mengembangkan dan memanfaatkan potensi alam secara maksimal, dan pelaksanaan program pembangunan tercapai.

Perencanaan pembangunan akan tepat mengenai sasaran, terlaksana dengan baik dan bermanfaat hasilnya jika dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pembangunan haruslah dilaksanakan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Pandangan ini menunjukkan asas demokrasi dalam konsep pembangunan nasional.

Masyarakat perlu dilibatkan secara langsung bukan karena mobilisasi, melainkan sebagai bentuk partisipasi yang dilandasi oleh kesadaran. Dalam proses pembangunan, masyarakat tidak semata-mata diperlakukan sebagai obyek, tetapi lebih sebagai subyek dan aktor atau pelaku.

Partisipasi masyarakat merupakan modal utama dalam upaya mencapai sasaran program pemerintah diseluruh wilayah Republik Indonesia. Keberhasilan dalam pencapaian sasaran pelaksanaan program pembangunan bukan semata-mata didasarkan pada kemampuan aparaturnya pemerintah, tetapi juga berkaitan dengan upaya mewujudkan kemampuan dan keamanan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan program pembangunan. Adanya partisipasi masyarakat akan mampu

mengimbangi keterbatasan biaya dan kemampuan pemerintah dalam pencapaian pelaksanaan program pembangunan tersebut.

Pembangunan yang berbasis partisipasi masyarakat harus mempunyai karakteristik *bottom-up*, demikian halnya dengan proses pengambilan keputusan karena masyarakatlah yang mengetahui kebutuhan dan masalah yang dihadapi. Merekalah yang memiliki kebebasan untuk memutuskan pelaksanaan suatu kegiatan pembangunan.

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa yang diharapkan, diperlukan keterlibatan seluruh masyarakat sebagai pelaku pembangunan karena dengan adanya keterlibatan itu, maka suatu pembangunan akan bisa dirasakan secara merata, dan tidak hanya oleh pihak-pihak tertentu saja.

Hubungannya dengan pembangunan desa partisipasi masyarakat sangat penting dalam pembangunan desa mengingat masyarakat setempatlah yang lebih mengetahui berbagai permasalahan dan potensi sumber daya yang ada sehingga memudahkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, dengan adanya peran partisipasi masyarakat maka hasil dari pembangunan yang dilakukan nantinya diharapkan dapat sesuai dengan keinginan dan kebutuhan dari masyarakat.

Tujuan pembangunan pedesaan jangka panjang adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan secara langsung melalui peningkatan kesempatan kerja, kesempatan berusaha dan pendapatan berdasarkan pendekatan bina lingkungan, bina usaha, dan secara tidak langsung adalah meletakkan

dasar-dasar yang kokoh bagi pembangunan nasional.

Tujuan pembangunan pedesaan jangka pendek adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan ekonomi dan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam. Untuk itu pedesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki, serta aspirasi dan prioritas masyarakat pedesaan, karena itulah pembangunan pedesaan diindonesia menginginkan agar masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan.

Satu hal yang menarik dari Kabupaten Rokan Hilir ini, yaitu sampai sekarang penyebutan desa masih menggunakan kata kepenghuluan dan datuk penghulu untuk menyebut kepala desanya. Hal ini sudah menjadi peraturan daerah yakni bagi setiap daerah yang masuk ke dalam Kabupaten Rokan Hilir wajib menggunakan kata kepenghuluan untuk menyebut sebuah desa. Cara kerja atau struktur keorganisasian kepenghuluan ini sebenarnya sama saja seperti sistem keorganisasian desa, hanya saja penyebutannya yang berbeda. Dengan kata lain kepenghuluan dan desa itu sama saja.

Menurut data sejarah, sebelum tahun 1979, di daerah ini untuk penyebutan sebuah desa menggunakan kata kepenghuluan. Namun setelah lahirnya UU No.5 Tahun 1979, penyebutan kepenghuluan diganti menjadi desa dan berdasarkan UU No.22 Tahun 1999 secara historis penyebutan desa diganti menjadi kepenghuluan yang dipimpin oleh seorang datuk penghulu. Penyebutan datuk penghulu ini dianggap lebih terhormat dari pada kepala Desa hingga sekarang munculnya UU

No.32 Tahun 2004 Tentang Desa penyebutan desa di Kabupaten Rokan Hilir masih menggunakan nama Kepenghuluan.

Dalam perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 08 Tahun 2009 , Tentang Pembangunan Kawasan Kepenghuluan. Pada pasal 4 ayat 1 dijelaskan “pembangunan kawasan kepenghuluan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan atau pihak ketiga mengikutsertakan pemerintah kepenghuluan, BPK dan lembaga kemasyarakatan sebagai bentuk partisipasi masyarakat”.

Pada pasal 5 ayat 1 dijelaskan bahwa bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan kawasan kepenghuluan meliputi:

1. Memberikan informasi tentang potensi kepenghuluan serta aspirasi tentang peruntukan dan pemanfaatan tata ruang
2. Memberikan informasi dan argumentasi keberatan-keberatan masyarakat terhadap rencana tata ruang
3. Melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses penyusunan dokumen perencanaan tata ruang
4. Memanfaatkan hasil pembangunan kawasan kepenghuluan
5. Memelihara keserasian dan kelestarian lingkungan kawasan kepenghuluan
6. Mengembangkan hasil-hasil pembangunan kawasan kepenghuluan

Jika dikaitkan dengan pembangunan dikepenghuluan, perda diatas menjelaskan bahwa suatu pembangunan fisik yang dilakukan di kepenghuluan harus didasarkan atas kepentingan dan kebutuhan masyarakat setempat.

Kepenghuluan merupakan ujung tombak dari pembangunan nasional, dimana kepala

kepenghuluan dipegang oleh datuk penghulu. Tugas dan kewajiban datuk penghulu yaitu menyelenggarakan pembangunan, membina masyarakat dan perekonomian kepenghuluan. Sedangkan kewajiban penghulu yakni mengembangkan pendapat masyarakat, memelihara ketentraman dan ketertiban dan meningkatkan kesejahteraan dikalangan masyarakat.

Dari perda diatas bisa dijelaskan bahwa untuk melaksanakan tugas dan untuk memenuhi kewajibannya datuk penghulu harus mampu mengajak masyarakatnya untuk berpartisipasi dalam pembangunan fisik di kepenghuluan karena dengan adanya keterlibatan masyarakat tersebut suatu pembangunan fisik yang akan dilakukan di kepenghuluan akan mudah terwujud dengan cepat.

Dalam suatu pembangunan fisik partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan karena partisipasi bisa dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan dari suatu pembangunan yang dilakukan dalam UUD 1945 menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan hak dasar warga Negara.

Pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik juga dapat membawa keuntungan substansi, dimana dalam pelaksanaan pembangunan itu akan lebih efektif dan efisien, selain itu bisa memberikan sebuah jasa kepuasan bagi pemerintah karena program-program pembangunan yang dilakukan mendapat dukungan kuat dari masyarakat kepenghuluan.

Bangko Pusaka adalah sebuah kepenghuluan yang terletak di Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir, dimana di Kabupaten Rokan Hilir setiap kepenghuluan mendapat Alokasi

Dana Desa (ADD) sebesar 1 milyar, dimana dana tersebut akan digunakan untuk pembangunan di setiap masing-masing kepenghuluan. mengingat masih ada beberapa pembangunan yang tidak tepat sasaran dan tidak mencapai target seperti:

1. Pembangunan Box covert di Dusun Mulya Makmur tidak tepat sasaran karena menurut masyarakat setempat mereka lebih membutuhkan pembangunan yang lain seperti sarana pendidikan dalam hal ini PDTA mengingat jumlah PDTA di Kepenghuluan Bangko Pusaka masih sangat minim.
2. Pembangunan Sumur bor di Dusun Mulya Makmur juga menjadi masalah yang serius karena tidak mencapai target (air tidak keluar). Padahal dana yang direalisasikan telah habis namun air tetap tak kunjung keluar, dan dana yang telah direalisasikan juga akhirnya terbuang sia-sia.
3. Selain itu pembangunan Semenisasi Jalan Dusun Marakeluang juga kurang diminati oleh masyarakat setempat mengingat pembangunan tersebut tidak mencapai target, selain itu baru beberapa bulan semenisasi jalan tersebut sudah mulai rusak (berlubang-lubang).

Dari data-data diatas dapat kita lihat betapa pentingnya keikutsertaan masyarakat dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Kepenghuluan (musrenbangkep) agar masyarakat bisa memberikan sumbangsih fikiran/ide dalam penyusunan rencana pembangunan, mengingat masyarakat setempatlah yang lebih memahami pembangunan apa yang di inginkan dan dibutuhkan oleh seluruh masyarakat.

Selain itu partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal karena masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut.

Selain itu dapat dijelaskan juga bahwa di Kepenghuluan Bangko Pusaka masih banyak pembangunan yang perlu dilakukan untuk mendorong perekonomian masyarakat, memudahkan masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, mendapatkan pelayanan umum dari pemerintah, dan mendapatkan pendidikan jika hanya mengharapkan bantuan pembangunan dari pemerintah daerah mungkin akan lama terealisasi.

Berdasarkan uraian maupun data-data diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan menetapkan judul **“Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan fisik di Kepenghuluan Bangko Pusaka Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir”**.

Konsep Teori

1. Administrasi Pembangunan

a. Pengertian Administrasi pembangunan

Mashur (2016:63), menyatakan bahwa definisi kerja dari administrasi pembangunan adalah seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu Negara

bangsa untuk bertumbuh, berkembang, dan berubah secara sadar dan terencana disemua segi kehidupan dan penghidupan Negara bangsa yang bersangkutan dalam rangka pencapaian tujuan.

Defenisi tersebut secara implisit menunjukan bahwa upaya dan kegiatan pembangunan merupakan “upaya nasional”. Artinya menyelenggarakan pembangunan bukan hanya tugas dan tanggung jawab pemerintah dan seluruh aparat dan jajarannya meskipun harus diakui bahwa peranan pemerintah cukup dominan. Singkatnya, pembangunan merupakan “urusan” semua pihak dalam suatu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam kegiatan penyelenggaraan kegiatan pembangunan, tidak ada warga masyarakat bangsa yang hanya berperan sebagai “penonton” semua harus berperan sebagai pemain.

Todaro (2000:18), menyatakan bahwa pembangunan bukan hanya fenomena semata, namun pada akhirnya pembangunan, namun pada akhirnya pembangunan tersebut harus melampaui sisi materi dan keuangan dari kehidupan manusia.

Todaro (2000:20), mendefinisikan pembangunan merupakan suatu proses multidimensial yang meliputi perubahan-perubahan struktur sosial, sikap masyarakat, lembaga-lembaga nasional, sekaligus

peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan dan pemberantasan kemiskinan.

Menurut Todaro (2000:21), definisi di atas memberikan beberapa implikasi bahwa:

- 1) Pembangunan bukan hanya diarahkan untuk peningkatan *income*, tetapi juga pemerataan.
- 2) Pembangunan juga harus memperhatikan aspek kemanusiaan, seperti peningkatan:
 - a) *Life sustenance* yaitu kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar.
 - b) *Self-Esteem* yaitu kemampuan untuk menjadi orang yang utuh yang memiliki harga diri, dan
 - c) *Freedom From Survitute* yaitu kemampuan untuk melakukan berbagai pilihan dalam hidup, yang tentunya tidak merugikan orang lain.

Konsep dasar di atas telah melahirkan beberapa arti pembangunan yang sekarang ini menjadi populer Todaro (2000:24), yaitu:

- b. Perencanaan Pembangunan
Perencanaan pembangunan merupakan kegiatan hampir sama dengan riset atau penelitian, dikarenakan instrumen yang digunakan adalah metode-metode riset. Kegiatannya

berawal dari teknik pengumpulan data, analisis data sampai dengan studi lapangan untuk memperoleh data-data yang akurat. Data yang dilapangan sebagai data penting dan utama yang akan dipakai dalam kegiatan perencanaan pembangunan. Dengan demikian perencanaan pembangunan dapat diartikan sebagai suatu proses perumusan alternatif-alternatif atau keputusan-keputusan yang didasarkan pada data-data dan fakta-fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan atau aktifitas kemasyarakatan, baik yang bersifat fisik (material) maupun non fisik (mental atau spiritual), dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik.

2. Partisipasi

a. Pengertian Partisipasi

Partisipasi oleh banyak kalangan disamakan pengertiannya dengan keikutsertaan, turut serta mengambil bagian. Hal ini menunjukkan adanya unsur keterlibatan dari dalam suatu kegiatan.

Menurut Mubyarto (2000:28) partisipasi masyarakat adalah sebagai kesediaan untuk membantu berhasilnya program yang dicanangkan oleh pemerintah sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa mengorbankan kepentingan diri sendiri.

b. Pengertian masyarakat

Masyarakat dalam istilah bahasa Inggris adalah *society* yang berasal dari kata Latin *socius* yang berarti (kawan). Istilah masyarakat berasal dari kata bahasa Arab *syaraka* yang berarti (ikut serta dan berpartisipasi). Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul, dalam istilah ilmiah adalah saling berinteraksi. Suatu kesatuan manusia dapat mempunyai prasarana melalui warga-warganya dapat saling berinteraksi.

Defenisi lain, masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontiniu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Kontinuitas merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki keempat ciri, yaitu:

- 1) Interaksi antar warga-warganya
 - 2) Adat istiadat
 - 3) Kontinuitas waktu
 - 4) Rasa identitas kuat yang mengikat semua warga.
- Koentjaraningrat (2009:115-118)

c. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat ialah proses pengambilan keputusan langsung dalam kebijakan publik. Masyarakat berpartisipasi secara langsung dalam pengambilan keputusan pada lembaga dan proses pemerintahan. Partisipasi menempatkan masyarakat tidak hanya sebagai

penerima (objek) tetapi sebagai subjek dari kegiatan pembangunan yang dilakukan. Huraerah (2008:100)

Menurut Conyers (1998:154), ada tiga alasan utama mengapa partisipasi masyarakat mempunyai sifat sangat penting.

- 1) Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal.
- 2) Masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut.
- 3) Timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri. Dapat dirasakan bahwa merekapun mempunyai hak untuk turut memberikan saran dalam menentukan jenis pembangunan yang akan dilaksanakan.

Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih dari penelitian ini adalah Kecamatan Bangko Pusako yang mana Kecamatan Bangko Pusako merupakan salah satu Kecamatan yang berada di Kabupaten Rokan Hilir.

Adapun fokus penelitian nantinya ditempatkan di Kepenghuluan Bangko Pusako Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir. Dimana wilayah Kepenghuluan Bangko Pusako merupakan kepenghuluan yang sedang berkembang dan terindikasi keterbelakangan pembangunan terutama dalam pembangunan fisik.

2. Informan Penelitian

a. Informan Penelitian

Untuk memperoleh data guna kepentingan penelitian ini, maka diperlukan informan. Pemilihan informan dalam penelitian ini diambil dengan maksud atau tujuan tertentu, yang mana menganggap bahwa subjek penelitian yang diambil tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian yang akan dilakukan ini.

Selain itu pemilihan informan dalam penelitian yang akan dilakukan ini disesuaikan dengan tujuan, dan permasalahan penelitian tentang partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan fisik di Kepenghuluan Bangko Pusako Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir, yaitu:

- a. Penghulu Kepenghuluan Bangko Pusako
- b. BPK (Badan Permusyawaratan Kepenghuluan).
- c. Tokoh Masyarakat
- d. Masyarakat Kepenghuluan Bangko Pusako.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam usaha pengambilan data yang diperlukan teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yang berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Observasi, yaitu cara mengumpulkan data yang berdasarkan atas tinjauan dan pengamatan penelitian secara langsung terhadap aspek -aspek yang terkait dengan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
2. Interview atau wawancara, yaitu tindakan dalam melakukan tanya jawab secara langsung dengan informan yang telah dipilih dalam hal pengumpulan informasi yang relevan.
3. Dokumentasi, yaitu pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen atau gambar.

4. Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data sekunder, adalah data yang diperoleh melalui studi pustaka (*library research*) untuk mengumpulkan data-data melalui buku-buku, peraturan-peraturan, serta dokumen-dokumen yang ada relevansinya dengan penelitian.

- b. Data primer, adalah data yang diperoleh dengan melakukan penelitian secara langsung melalui wawancara dengan informan dengan mengajukan daftar pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian.

5. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan studi pustaka dalam penelitian ini selanjutnya akan dianalisis secara kualitatif. Metode ini ditujukan untuk memahami gejala masalah yang diteliti dengan menekankan pada permasalahan pokok, mengenai peran serta masyarakat dalam proses perencanaan yang difokuskan pada pelaksanaan pembangunan kawasan kepenghuluan di Kepenghuluan Bangko Pusaka Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir.

Hasil

A. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Fisik di Kepenghuluan Bangko Pusaka Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir

Partisipasi dalam pembangunan dapat diterapkan dalam keikutsertaan pada proses-proses pembangunan, dimulai dari perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan, evaluasi pembangunan, dan menikmati hasil pembangunan. Partisipasi ini terutama berkaitan dengan penentuan alternatif dari masyarakat berupa ide/gagasan yang menyangkut kepentingan bersama. Manfaat dari perencanaan ini diantaranya adalah standar pelaksanaan dan pengawasan,

pemilihan alternatif terbaik, penyusunan skala prioritas, baik sasaran maupun kegiatan. Adapun bentuk partisipasi masyarakat dalam perencanaan misalnya dalam menyumbangkan gagasan ataupun pemikiran, kehadiran dalam rapat (musrenbangkep), diskusi dan tanggapan atau perwakilan terhadap program yang ditawarkan.

Musrenbangkep dapat menjadi sarana awal membentuk masyarakat yang partisipatif. Selain hal tersebut isu pemberdayaan masyarakat dalam rangka mensejahterakan kehidupan masyarakat diwilayah kepenghuluan. Masyarakat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan sangat dekat dengan permasalahan-permasalahan diwilayahnya sangat diperlukan keterlibatannya dalam pelaksanaan musrenbangkep.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori Soetomo (2010:09) keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan bukan karena mobilisasi, melainkan sebagai bentuk partisipasi yang dilandasi oleh determinasi dan kesadaran. Pelibatan dalam pengertian partisipasi bukan mobilisasi masyarakat dalam keseluruhan proses pembangunan ialah Partisipasi masyarakat dalam perumusan/perencanaan

pembangunan, Partisipasi masyarakat dalam tahap pelaksanaan dan pengelolaan pembangunan, Partisipasi masyarakat dalam tahap evaluasi pembangunan, dan Partisipasi dalam menikmati hasil pembangunan.

Dalam penelitian ini terdiri atas dua bagian utama yaitu:

A. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Fisik di Kepenghuluan Bangko Pusaka Kecamatan Bangko Busako Kabupaten Rokan Hilir.

1. Partisipasi masyarakat dalam perumusan/perencanaan pembangunan.
 2. Partisipasi masyarakat dalam tahap pelaksanaan dan pengelolaan pembangunan.
 3. Partisipasi masyarakat dalam tahap evaluasi pembangunan.
 4. Partisipasi dalam menikmati hasil pembangunan.
- B. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik.

Berikut ini hasil dari penelitian yang penulis lakukan di Kepenghuluan Bangko Pusaka Kecamatan Bangko Pusaka Kabupaten Rokan Hilir:

1. Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan

Tahapan awal dalam pembangunan adalah perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan itu sendiri dapat melalui pelaksanaan forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kepenghuluan (Musrenbangkep). Namun musrenbangkep tahun 2015 di Kepenghuluan Bangko Pusaka tidak dilaksanakan, hal ini dikarenakan pembangunan di Kepenghuluan Bangko Pusaka pada tahun 2015 menggunakan ADD. Dimana program ADD pada tahun 2015 itu adalah program pertama kalinya dan dikatakan program baru, selain itu jangka waktu yang sangat singkat untuk melakukan perencanaan pembangunan yang ditentukan oleh Bapenas membuat pihak pemerintah kepenghuluan tidak mengadakan musrenbangkep.

2. Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan

Partisipasi dalam pelaksanaan operasional pembangunan meliputi menggerakkan sumber daya dana, kegiatan administrasi koordinasi dari penjabaran program. Partisipasi dalam pelaksanaan merupakan kelanjutan dalam perencanaan yang telah digagas sebelumnya baik yang berkaitan dalam perencanaan, pelaksanaan maupun tujuan. Dalam berpartisipasi masyarakat dapat bersikap aktif dan pasif.

1. Partisipasi Masyarakat dalam Mengevaluasi Pembangunan

Partisipasi masyarakat dalam mengevaluasi pembangunan merupakan keterlibatan masyarakat dalam menilai sejauh mana pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana dan sejauh mana hasilnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Partisipasi dalam evaluasi ini berkaitan dengan pelaksanaan program yang sudah direncanakan sebelumnya. Partisipasi dalam evaluasi ini bertujuan untuk memenuhi ketercapaian program yang sudah direncanakan sebelumnya. Dalam berpartisipasi menilai pembangunan masyarakat dapat bersikap aktif dan pasif.

Seperti pembahasan yang sebelumnya, bahwa masyarakat di Kepenghuluan Bangko Pusaka ikut serta terlibat dalam pembangunan fisik seperti pembangunan box covert, sumur bor, terali dan parker kantor Kepenghuluan Bangko Pusaka, MCK PAUD Tunas Pusaka, semenisasi jalan.

Namun keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan fisik bukan lah kegiatan yang berasal dari APBD kabupaten, melainkan kegiatan yang berasal dari pihak kepenghuluan melalui dana ADD tahun 2015.

3. Partisipasi Masyarakat dalam Menikmati Hasil Pembangunan

Partisipasi masyarakat dalam menikmati dan memanfaatkan hasil pembangunan dapat diartikan sebagai peran masyarakat dalam merawat, memelihara, dan menjaga hasil pembangunan tersebut agar hasil pembangunan yang telah direncanakan kemudian dilaksanakan, dan dievaluasi dapat digunakan setiap saat dan berlangsung lama. Sebab masyarakat merupakan objek yang terlibat langsung dalam penggunaan dan pemeliharaan hasil pembangunan.

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Fisik di Kepenghuluan Bangko Pusaka Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir

1. Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor dari luar yang mempengaruhi suatu program partisipasi yang akan dilaksanakan. Faktor eksternal yang dalam hal ini juga sangat berpengaruh dalam pembangunan fisik dimana faktor eksternal akan penulis uraikan pada masing masing indikator menurut hasil wawancara sebagai berikut:

a. Komunikasi

Dalam pelaksanaan suatu program pembangunan baik fisik

maupun non fisik, sangatlah diperlukan suatu Komunikasi yang intensif antara sesama warga masyarakat. Agar terjalin suatu hubungan kerja sama yang harmonis serta rasa kepedulian terhadap lingkungan guna kelancaran pembangunan fisik sesuai dengan keinginan bersama. Hal ini tidak tentu terlepas dari campur tangan pemerintah kepenghuluan baik dari mulai penghulu, lembaga kepenghuluan, seluruh staf kepenghuluan dan kepala dusun serta RT dan RW sebagai koordinator pelaksanaan dalam pembangunan fisik. Sebagai koordinator untuk menciptakan suasana kekeluargaan antar sesama warga yang kondusif sehingga pelaksanaan suatu pembangunan fisik dapat berjalan dengan baik.

Komunikasi dapat membantu pelaksanaan pembangunan fisik yang telah di buat. Dari komunikasi ini diharapkan kepada seluruh masyarakat yang melaksanakan pembangunan fisik mengerti tujuan dari rencana pembangunan fisik. Dimana komunikasi merupakan alat untuk memperlancar kegiatan pembangunan fisik yang dilakukan di Kepenghuluan Bangko Pusaka. Diharapkan dengan adanya komunikasi pembangunan yang akan dilaksanakan di Kepenghuluan Bangko Pusaka akan berjalan dengan baik.

Komunikasi dalam suatu partisipasi masyarakat untuk pembangunan fisik di Kepenghuluan Bangko Pusaka tidak lah begitu baik, contohnya saja dalam hal perencanaan pembangunan. Masyarakat banyak yang tidak mengetahui kapan diadakannya musrenbang dan mereka juga merasa sama sekali tidak diundang,

namun kalau untuk kegiatan gotong royong dalam hal ini adalah untuk berpartisipasi dalam pemeliharaan dan pemanfaatan hasil pembangunan masyarakat hanya diundang secara lisan.

b. Ekonomi, Sosial, Politik dan Budaya

Ekonomi, sosial, politik, dan budaya baik dalam kehidupan keluarga, pergaulan, sekolah maupun bangsa yang menguntungkan bagi serta mendorong tumbuh kembangnya partisipasi masyarakat.

Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembentukan keputusan. Pengertian merupakan upaya penggabungan antar berbagai definisi yang berbedanya mengenai hakikat politik yang dikenal dalam politik yang mendalam. berpartisipasi dalam pembangunan fisik juga dipengaruhi oleh ekonomi, sosial, dan politik.

Perubahan sosial budaya adalah sebuah gejala berubah struktur sosial dan pola budaya dalam suatu masyarakat. Perubahan sosial budaya merupakan gejala umum yang terjadi sepanjang masa dalam setiap masyarakat. Perubahan itu terjadi sesuai dengan hakikat dan sifat dasar manusia yang selalu ingin melakukan perubahan. Karena kebosanan manusia sebenarnya yang merupakan penyebab dari perubahan.

c. Kesempatan Berpartisipasi

Kesempatan berpartisipasi, keadaan lingkungan serta proses dan struktur sosial, sistem nilai dan norma-norma yang memungkinkan dan mendorong terjadinya partisipasi sosial.

Prinsip partisipasi adalah masyarakat berperan secara aktif dalam proses atau alur tahapan sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan dengan memberikan sumbangan tenaga, pikiran-pikiran, atau dalam bentuk materi.

Partisipasi merupakan perilaku yang memberikan pemikiran terhadap sesuatu atau seseorang. Perilaku merupakan aktivitas yang dilakukan seseorang dalam hubungannya dengan pemeliharaan rangsangan yang dari luar lingkungannya serta pemutusan energi praktis yang tertuju pada suatu objek dan juga meliputi banyak sedikitnya kesadaran yang menyertai sesuatu aktivitas yang sedang dilakukan.

Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik adalah perilaku masyarakat yang dilaksanakan secara sadar untuk melakukan berbagai tindakan secara maksimal untuk mendukung keberhasilan suatu program pembangunan fisik.

d. Kebebasan dan Berkreasi

Kebebasan untuk berprakarsa dan berkreasi lingkungan di dalam keluarga masyarakat atau lingkungan politik, sosial, budaya yang memungkinkan dan mendorong timbul dan berkembangnya prakarsa gagasan perseorangan atau kelompok. Kebebasan ini merupakan gabungan dari kebebasan berpendapat dan berkelompok.

Partisipasi sebuah pikiran lebih merupakan partisipasi berupa sumbangan ide, pendapat, atau sebuah pemikiran konstruktif, baik untuk menyusun program maupun untuk memperlancar pelaksanaan program dan juga untuk mewujudkannya dengan memberikan pengalaman dan pengetahuan guna mengembangkan kegiatan yang diikuti.

2. Faktor Internal

Faktor internal merupakan faktor dari dalam kelompok masyarakat sendiri, yaitu individu-individu dan kesatuan kelompok di dalamnya yang mempengaruhi masyarakat untuk ikut dalam suatu pembangunan fisik yang akan dilaksanakan bersama. Faktor internal yang dalam hal ini akan melihat bagaimana partisipasi masyarakat dalam berpartisipasi untuk pembangunan fisik.

Faktor internal akan penulis uraikan pada masing-masing indikator menurut hasil wawancara sebagai berikut:

a. Usia

Faktor usia merupakan faktor yang mempengaruhi sikap seseorang terhadap kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang ada. Mereka dari kelompok usia menengah keatas dengan keterkaitan moral kepada nilai dan norma masyarakat yang lebih mantap cenderung lebih banyak yang berpartisipasi dari pada mereka yang dari kelompok usia lainnya.

b. Jenis Kelamin

Nilai yang cukup lama dominan dalam kultural berbagai bangsa mengatakan bahwa pada dasarnya peranan perempuan adalah di dapur yang berarti bahwa dalam banyak masyarakat peranan perempuan yang terutama adalah mengurus rumah tangga, akan tetapi semakin lama nilai peran perempuan tersebut telah bergeser dengan adanya emansipasi dan pendidikan perempuan yang semakin baik.

c. Pendidikan

Dikatakan sebagai salah satu syarat untuk berpartisipasi, pendidikan dianggap dapat mempengaruhi sikap hidup seseorang terhadap lingkungannya, suatu sikap yang diperlukan bagi peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat.

d. Pekerjaan dan Penghasilan

Di dalam suatu kehidupan bermasyarakat terdapat banyak berbagai macam tingkat kesejahteraan sosial yang mana cukup mempengaruhi terhadap kondisi lingkungan yang ada dalam masyarakat tersebut. Salah satu unsur yang ada dalam kesejahteraan sosial adalah pekerjaan dan penghasilan.

e. Lamanya Tinggal

Sosialisasi di dalam kehidupan bermasyarakat sangat menentukan terciptanya kehidupan bermasyarakat

yang harmonis, keakraban antar sesama warga ini terjadi dengan berbagai cara, seperti pergaulan yang baik. Pergaulan yang baik ini contohnya dengan saling tegur sapa dengan tetangga, berpartisipasi terhadap semua kegiatan yang bersifat positif yang ada dilingkungan tersebut, semakin pergaulan yang baik itu terjalin dengan tetangga maka akan terciptanya suasana yang baik.

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dan pembahasan yang telah di ungkapkan pada sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan dari partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik di Kepenghuluan Bangko Pusako adalah sebagai berikut:

1. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Fisik

Dalam beberapa indikator yang dikaji dan dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan partisipasi masyarakat mulai dari penyusunan rencana hingga evaluasi harus melibatkan masyarakat dalam suatu pengambilan keputusan dan dalam pelaksanaannya sangatlah dibutuhkan koordinasi yang baik. Sehingga kegiatan atau perencanaannya yang telah dibuat terlaksana dengan baik sesuai tujuan bersama.

Partisipasi dalam bentuk memberikan ide/saran dalam perencanaan pembangunan fisik masih sangat pasif sekali, karena kurangnya rasa kepedulian pemerintah kepenghuluan dalam memberikan alat sebagai sarana masyarakat untuk memberikan ide/saran dalam menentukan arah pembangunan di lingkungan mereka. Sedangkan dalam bentuk tenaga sudah cukup baik dengan adanya

program ADD yang menggunakan sistem swakelola dalam melaksanakan pembangunan namun sistem ini juga membuat hanya sebagian masyarakat saja yang ikut berpartisipasi.

Partisipasi masyarakat dalam bentuk evaluasi pembangunan dan dalam menikmati hasil pembangunan masih sangat pasif sekali. Hal ini disebabkan karena kurangnya komunikasi antara pemerintah kepenghuluan dengan masyarakat, yang membuat program-program pembangunan yang dilakukan tidak berjalan dengan baik, selain itu dikarenakan program ADD ini masih program baru dan baru pertama kalinya dilaksanakan maka masih banyak terjadi kekurangan dalam menjalankan program tersebut.

2. Faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik

Faktor internal yang lebih dominan dalam pembangunan fisik ialah faktor usia dan lamanya tinggal. Sebab faktor ini sangat menentukan partisipasi dilapangan pada saat kegiatan, serta faktor lamanya tinggal juga mempengaruhi partisipasi dilapangan, karena lamanya tinggal akan mempengaruhi rasa kepedulian terhadap lingkungan sekitar dan juga kekeluargaan yang baik terhadap masyarakat sekitar.

Faktor eksternal yang sangat mempengaruhi partisipasi dalam pembangunan fisik ialah komunikasi dan kesempatan berpartisipasi. Faktor ini sangat mempengaruhi partisipasi masyarakat karena

faktor komunikasi di butuhkan dalam penyampaian informasi kegiatan kepada masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan dilapangan. Faktor kesempatan berpartisipasi sangat dibutuhkan guna menumbuhkan rasa kepercayaan diri seseorang dalam penyampaian ide ataupun tenaga dalam pembangaunan fisik.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan khususnya pembangunan non fisik di Kepenghuluan Bangko Pusako sudah aktif, dimana bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi para masyarakat di Kepenghuluan antusias ikut serta mengambil bagian dan ikut serta berkontribusi dalam kelangsungan kegiatan diberbagai bidang pembangunan non fisik. Hal yang disayangkan adalah proses *top-down* dan *button-up* belum tersinkronisasi dan saling melengkapi dalam perencanaan hingga pelaksanaan program yang berada di tengah-tengah masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Soetomo. 2010. *Strategi-strategi pembangunan masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ach. Wazir Ws, et al., ed. 1999. *Panduan Penguatan Menejemen Lembaga Swadaya Masyarakat*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka utama.
- Arimbi. 2002. *Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan*. Jakarta: WALHI.
- Dharmawan. A. H. 2002. *Pengembangan Komunitas dan Pedesaan Berkelanjutan*. Bogor:

Jurusan Ilmu Sosial Ekonomi
IPB.

Huraerah Abu. 2008. *Pengorganisasian, Pengembangan Masyarakat Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Bandung: Humaniora.

Isbandi Rukminto Adi. 2007. *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: dari Pemikiran Menuju Penerapan*. Depok: FISIP UI Press.

Iskandar, Huraerah. 2004. *Teori dan Isu Pembangunan*. Bandung: Puspaga

Johannes Muller. 2006. *Perkembangan Masyarakat Lintas-Ilmu*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Kunarjo. 2002. *Perencana dan Pengendalian Program Pembangunan*, Jakarta: UI Press.

Loekman Soetrisno. 1998. *Menuju Masyarakat Partisipatif*. Yogyakarta: Kanisius.

Mikkelsen, Britha. 2001. *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-Upaya Pemberdayaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Mubyarto. 2000. *Administrasi pembangunan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Mulyadi, Mohammad. 2009. *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan*. Jakarta: Nadi Pustaka.

Riyadi & Dedy Supriyady
Bratakusumah. 2004.

Perencanaan Pembangunan Daerah: Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah, Jakarta: PT Gramedia Pustaka utama.

Sastropoetro, RA. Santoso. 1988. *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi, dan Disiplin dalam Pembangunan*. Bandung: Penerbit Alumni

Soejono, Soekanto. 2002. *Kamus Sosiologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Tjokroamidjoyo, Bintoro. 2001. *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: Gunung Agung.

Todaro, Michael P. 2000. *Pembangunan Ekonomi Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga.

Mashur, Dadang. 2016. *Administrasi pembangunan*. Pekanbaru: Alaf Riau Pekanbaru.

Holil, Sulaiman. 1990. *Partisipasi Masyarakat Dalam Usaha Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Pradya Paramita.

Dokumen lainnya :

UU Negara Republik Indonesia No 32
Tahun 2004 Tentang Desa

Perda Kabupaten Rokan Hilir No 08
Tahun 2009 Tentang
Pembangunan Kawasan
Kepenghuluan